

Analisis Gaya Kepemimpinan Pemimpin Lokal dalam Pengelolaan Desa Wisata Kebonsari Melalui Sektor Pariwisata, Bisnis, dan Budaya

Sesilia Eka Tri Astuti¹, Stephany Emmanuela Lesar¹, Vioni Merici Manik¹

¹Program Studi Sosiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
231008240@students.uajy.ac.id

Untuk mengutip artikel ini:

Asuti, S. E. T., Lesar, S. E., & Manik, V. M., (2025). Analisis Gaya Kepemimpinan Pemimpin Lokal dalam Pengelolaan Desa Wisata Kebonsari Melalui Sektor Pariwisata, Bisnis, dan Budaya. *Working Papers Laboratorium Sosiologi FISIP UAJY*, 11(2), 105-122.

ABSTRAK

Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat menempatkan kepemimpinan lokal sebagai faktor penting dalam mendorong partisipasi warga dan keberlanjutan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan Kepala BUMDes dalam pengelolaan Desa Wisata Kampung Pring Kebonsari melalui sektor pariwisata, bisnis, dan budaya. Kerangka teori yang digunakan merujuk pada konsep kepemimpinan lokal yang menekankan unsur pengaruh, partisipasi, komunikasi, dan perubahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, *Focus Group Discussion (FGD)*, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan di Kebonsari bersifat kolektif dan kontekstual. Kepemimpinan BUMDes pada sektor pariwisata dan bisnis cenderung inisiatif-terarah, sementara kepemimpinan kelurahan pada sektor budaya bersifat suportif dan partisipatoris. Kesimpulannya, kombinasi gaya kepemimpinan tersebut berperan penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan mendukung keberlanjutan desa wisata berbasis bambu.

Kata kunci: BUMDes; Desa Wisata; Kepemimpinan Lokal; Partisipasi Masyarakat.

ABSTRACT

The development of community-based tourism villages places local leadership as a key factor in encouraging community participation and ensuring sustainable rural development. This study aims to analyze the leadership style of the Head of BUMDes in managing Kampung Pring Kebonsari Tourism Village through the tourism, business, and cultural sectors. The theoretical framework is based on the concept of local leadership emphasizing influence, participation, communication, and change. This research employs a qualitative approach with a case study strategy. Data were collected through observation, interviews, Focus Group Discussions (FGD), and documentation, and analyzed inductively. The findings indicate that leadership in Kampung Pring Kebonsari is collective and contextual. BUMDes leadership in the tourism and business sectors tends to be initiative-oriented and directive, while leadership in the cultural sector is more supportive and participatory, led by the village government. In conclusion, this combination of leadership styles plays an important role in strengthening community participation and supporting the sustainability of bamboo-based tourism village development.

Keywords: BUMDes; Community Participation; Local Leadership; Tourism Village.

PENDAHULUAN

Desa wisata merupakan salah satu model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang tumbuh pesat di Indonesia pada satu dekade terakhir. Dalam kajian terbaru, Pratiwi & Nugroho (2021, hlm. 118) mendefinisikan desa wisata sebagai “wilayah pedesaan yang menawarkan pengalaman berwisata melalui keterlibatan langsung masyarakat, dengan memanfaatkan kekhasan budaya, lingkungan, dan aktivitas keseharian sebagai daya tarik utama,” menekankan bahwa desa wisata berfungsi sebagai model pembangunan partisipatif di mana warga menjadi aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan distribusi manfaat ekonomi. Desa wisata kini menjadi salah satu strategi penting dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Indonesia. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *community-based tourism (CBT)* dapat meningkatkan kesejahteraan. Sebagai aktor utama warga menjaga budaya sekaligus lingkungan desa. Susfenti (2016) menjelaskan bahwa desa wisata akan berhasil ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dan pemimpin lokal mampu menggerakkan warganya dalam pengelolaan wisata.

Pemahaman mengenai keragaman desa wisata kemudian menjadi penting sebelum menelaah bagaimana model tersebut diterapkan pada desa-desa sekitar destinasi besar. Salah satu destinasi besar di Indonesia yang menjadi salah satu Destinasi Super Prioritas di era kepemimpinan Presiden ke-7, Joko Widodo, adalah Borobudur yang hingga kini masih menjadi salah satu pusat wisata yang terkenal sampai ke kancah internasional. Kawasan Candi Borobudur menjadi contoh bagaimana destinasi besar dapat memengaruhi perkembangan desa-desa sekitarnya. Desa yang berada di sekitar Borobudur memiliki peluang untuk tumbuh sebagai destinasi alternatif melalui wisata budaya, kerajinan, ataupun edukasi.

Namun, perkembangan desa wisata sangat bergantung pada kondisi akses, fasilitas, kapasitas masyarakat, dan gaya kepemimpinan di desa tersebut. Mukti (2025) mencatat bahwa desa yang kekurangan infrastruktur dan kepemimpinan yang kuat cenderung berkembang lebih lambat. Konstelasi ini membuka ruang untuk meninjau bagaimana desa-desa sekitar Borobudur memanfaatkan potensi dan menghadapi hambatanya dalam konteks yang serupa. Dari desa-desa yang ada di sekitar Borobudur, ada satu desa yang fokus pada pengembangan desa wisata berbasis bambu, yaitu Kampung Pring Kebonsari yang menarik untuk dibahas dari segi kepemimpinan pemimpin-pemimpin desa dalam pengembangan desa wisata berbasis bambu.

Desa Kebonsari, salah satu desa di Kecamatan Borobudur, memiliki potensi besar melalui kerajinan bambu, seni tradisional, hasil bumi, dan agrowisata Borobudur. Kerajinan bambu yang ditekuni masyarakat secara turun-temurun telah menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif desa. Menurut Yuliana (2023, hlm. 55), kerajinan lokal dapat menjadi kekuatan utama desa wisata jika dikelola bersama masyarakat dan didampingi pemimpin yang mampu mendorong inovasi. Walaupun potensinya kuat, Kebonsari masih menghadapi beberapa kendala, seperti jalan desa yang sempit, fasilitas wisata yang terbatas, dan persaingan dengan desa wisata lain di sekitar Borobudur. Kondisi seperti ini umum terjadi pada banyak desa wisata, sebagaimana dijelaskan Alimi & Darwis (2023), bahwa infrastruktur dan kualitas pengelolaan sangat memengaruhi keberhasilan destinasi. Tapi di sisi lain, wisatawan yang datang ke Kebonsari sering mengalami pengalaman yang dekat dengan masyarakat, seperti mengikuti kegiatan edukasi kerajinan bambu. Interaksi langsung semacam ini sangat penting karena membuat wisata lebih bermakna bagi masyarakat maupun pengunjung. Situasi ini memperlihatkan perlunya memeriksa lebih jauh faktor yang menentukan keberhasilan desa wisata, terutama peran kepemimpinan lokal.

Dalam pengembangan desa wisata kepemimpinan lokal memiliki peran besar. Pemimpin desa, pengurus pokdarwis, tokoh budaya, dan penggerak komunitas menjadi figur yang menentukan arah dan keberhasilan desa wisata. Penelitian Widiono & Fathurrahman (2023) menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional yang mendorong visi, motivasi, dan inovasi dapat meningkatkan partisipasi warga. Sementara itu, penelitian Herliana, Kolopaking & Hakim (2021) menegaskan bahwa kepemimpinan demokratis di tingkat komunitas membuat masyarakat lebih aktif terlibat dalam pengelolaan wisata.

Kepemimpinan merupakan konsep penting dalam memahami bagaimana seorang pemimpin mengarahkan, mempengaruhi, dan menggerakkan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Supit (2023) menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan memberikan arahan, memengaruhi, serta menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga kepemimpinan tidak hanya terkait posisi formal tetapi juga kemampuan memengaruhi perilaku individu maupun kelompok. Azmy (2021) menambahkan bahwa kepemimpinan melibatkan kemampuan memotivasi dan mengajak orang lain agar bersedia memberikan kontribusi demi efektivitas organisasi, sehingga dimensi motivasional menjadi aspek penting dalam menumbuhkan kemauan anggota komunitas untuk bekerja menuju tujuan bersama. Sejalan dengan itu, (Nasution et al., 2020) menekankan bahwa kepemimpinan merupakan upaya menggerakkan individu maupun kelompok melalui pengaruh, komunikasi, dan kemampuan mengarahkan tindakan dalam melihat sistem secara menyeluruh. Dengan demikian, dalam penelitian ini kepemimpinan dipahami sebagai proses terpadu yang mencakup kemampuan memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi masyarakat untuk menghasilkan perubahan konstruktif dalam pengembangan Desa Wisata Kebonsari.

Konsep kepemimpinan dalam penelitian ini dibangun dari enam unsur utama, yaitu pengaruh, pengikut, tujuan, komunikasi, tanggung jawab, dan perubahan. Unsur pengaruh menjadi inti kepemimpinan karena pemimpin harus mampu memotivasi dan membangun kepercayaan (Azmy, 2021). Unsur pengikut menegaskan bahwa kepemimpinan baru dapat berjalan ketika terdapat individu yang bersedia menerima arahan pemimpin (Supit, 2023). Unsur tujuan berfungsi sebagai arah setiap keputusan dan tindakan pemimpin, sementara unsur komunikasi menjadi fondasi bagi terciptanya dialog dua arah dan kesepahaman bersama sebagaimana dijelaskan oleh Nasution et al. (2020). Unsur tanggung jawab menekankan kewajiban moral dan struktural pemimpin dalam membuat keputusan serta mendelegasikan tugas secara tepat. Unsur

perubahan menekankan kemampuan pemimpin untuk beradaptasi, berinovasi, dan menyesuaikan strategi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga pemimpin berperan sebagai agen transformasi (Supit, 2023).

Seluruh unsur kepemimpinan tersebut berhubungan langsung dengan tiga sektor utama di Desa Kebonsari, yaitu pariwisata, bisnis, dan budaya. Pada sektor pariwisata, pemimpin perlu membangun pengaruh, memperkuat komunikasi, dan mendorong perubahan agar masyarakat aktif terlibat dalam pengelolaan destinasi, pelayanan wisatawan, dan pengembangan wisata edukatif berbasis bambu. Pada sektor bisnis, unsur tujuan, tanggung jawab, dan pengaruh menjadi penting dalam mengarahkan pengembangan UMKM, meningkatkan profesionalitas usaha, serta memperluas jejaring pemasaran produk bambu agar mampu bersaing dengan pasar luar desa. Sementara itu, sektor budaya menuntut kepemimpinan yang mampu menjaga keseimbangan antara komunikasi dan perubahan, karena pemimpin diperlukan untuk menjaga nilai budaya lokal, mentransformasikan tradisi bambu menjadi daya tarik wisata, serta memastikan inovasi tidak menghilangkan identitas budaya masyarakat. Dengan demikian, kepemimpinan di ketiga sektor ini berfungsi untuk memperkuat sinergi antara pengembangan ekonomi, pelestarian budaya, dan partisipasi komunitas.

Karena itu, penelitian ini fokus melihat bagaimana potensi pariwisata, budaya dan bisnis berbasis bambu di Desa Kebonsari dapat dikembangkan dan didukung oleh kepemimpinan lokal. Pendahuluan ini menjadi dasar untuk memahami arah pengembangan Desa Kebonsari agar dapat tumbuh sebagai desa wisata yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara langsung apa peran kepemimpinan lokal dalam mendorong partisipasi masyarakat pada pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Kampung Pring Kebonsari, serta menelaah bagaimana gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan desa wisata tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana dijelaskan Creswell (2015), penelitian kualitatif merupakan proses eksplorasi untuk memahami makna perilaku individu maupun kelompok dalam konteks sosialnya. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus, karena penelitian dilakukan secara mendalam pada satu kasus tertentu dalam batas ruang dan waktu yang jelas, yaitu pengembangan Desa Wisata Kampung Pring di Desa Kebonsari. Peneliti terlibat

langsung dalam proses pengumpulan data melalui interaksi dengan aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata pada sektor pariwisata, bisnis, dan budaya.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Wisata Kampung Pring, Desa Kebonsari, dengan pelaksanaan pengumpulan data pada Oktober hingga Desember 2025. Observasi dan penggalian data dilakukan melalui serangkaian *Focus Group Discussion (FGD)* pada setiap pertemuan, karena keterbatasan waktu serta kesibukan masing-masing narasumber. Pertemuan pertama berlangsung pada 9 Oktober 2025, berupa observasi awal dan pengenalan desa, sekaligus penyampaian maksud serta tujuan penelitian kepada Pak Anang selaku narasumber pertama. Pertemuan kedua dilaksanakan pada 22 Oktober 2025 dalam bentuk *FGD* yang melibatkan Pak Galih selaku Ketua BUMDes, Pak Rimbang selaku Kepala Desa, Pak Heri selaku Ketua Mitra Wisata, Pak Beni selaku Koordinator Event & Edukasi, dan Pak Anang selaku tokoh aktif penggerak dalam sektor pariwisata, bisnis, dan budaya. Diskusi pada pertemuan ini berfokus pada pembahasan kepemimpinan Desa Kebonsari secara umum, termasuk struktur organisasi, pola koordinasi, serta arah pengembangan desa. Pertemuan ketiga berlangsung pada 4 Desember 2025, juga melalui *FGD*, dengan melibatkan Pak Anang dan Pak Fuad Hazim selaku tokoh aktif penggerak dalam sektor pariwisata, bisnis, dan budaya, serta Pak Tiok selaku perwakilan dari pemerintah desa. Pada sesi ini, pembahasan diarahkan secara lebih spesifik pada kepemimpinan di tiga sektor utama, yaitu pariwisata, bisnis, dan budaya. Selain itu, data sekunder yang diberikan langsung oleh informan turut mendukung pengamatan terhadap gaya kepemimpinan dalam pengelolaan ketiga sektor tersebut.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive* berdasarkan relevansi dan keterlibatan mereka dalam kepemimpinan lokal serta pengembangan desa wisata. Pemilihan teknik *purposive* dilakukan agar informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan data dan rumusan masalah penelitian. Teknik ini memungkinkan pengambilan informan yang benar-benar memahami dinamika kepemimpinan di Desa Kebonsari, baik dari sisi struktural maupun praktik sehari-hari.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara. Observasi langsung digunakan untuk memahami kondisi dan dinamika sosial di lapangan, alur kegiatan pariwisata, bisnis, dan budaya, serta peran masing-masing aktor dalam pengelolaan Desa Wisata Kampung Pring, Desa Kebonsari. Selain itu, *Focus Group Discussion (FGD)* digunakan untuk mendapatkan pandangan bersama dari para pihak yang terlibat. Peneliti juga mengumpulkan data melalui dokumentasi, seperti arsip desa, foto kegiatan, dan dokumen terkait pengelolaan wisata.

Data dianalisis menggunakan model analisis kualitatif yang bersifat induktif. Tahapan analisis dimulai dari mengorganisasi data, membaca keseluruhan informasi, mengidentifikasi kategori awal, melakukan pengkodean berdasarkan kategori tersebut, mengembangkan tema, hingga menarik makna dan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara siklus dan terus-menerus bersamaan dengan pengumpulan data, sebagaimana direkomendasikan dalam literatur metodologi kualitatif.

Untuk menjaga kredibilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan data dari berbagai informan, teknik pengumpulan, dan dokumen pendukung. Praktik ini sejalan dengan panduan keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Creswell. Penggunaan triangulasi bertujuan memastikan bahwa temuan penelitian memiliki keandalan dan dapat dipercaya.

TEMUAN & PEMBAHASAN

Sektor Pariwisata

Berbagai cerita informan menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata di Desa Kebonsari tidak dijalankan secara spontan, tetapi melalui pengaturan yang disepakati bersama. Setiap aktivitas wisata dilaksanakan dengan pembagian tugas yang jelas antarwarga, disertai koordinasi agar peran masing-masing tidak saling tumpang tindih. Alur kerja juga dijaga agar kegiatan dapat berjalan sesuai tahapan yang telah disepakati sebelumnya.

Gambaran tersebut ditegaskan oleh pernyataan informan yang menyebutkan bahwa organisasi pariwisata di Desa Kebonsari harus dijalankan secara “terparameter, terencana, dan terpola” agar dapat berkembang dengan baik (Wawancara, 22 Oktober 2025). Penjelasan ini memperlihatkan bahwa keteraturan dan kebersamaan menjadi dasar utama dalam pengelolaan pariwisata di Kebonsari, sebagaimana dipraktikkan langsung oleh para pelaku di lapangan.

Temuan lebih lanjut menegaskan bahwa pemimpin lokal menekankan pentingnya tahapan manajemen organisasi seperti *planning*, *organizing*, *action*, dan *controlling* sebagai fondasi kepemimpinan pariwisata. Informan menyatakan bahwa “leadership harus ada *planning*, *organizing*... *action*, *controlling*” dan pola tersebut “harus satu komando” (Wawancara, 22 Oktober 2025). Kutipan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pariwisata tidak ditentukan oleh kekuatan figur pemimpin, tetapi oleh kualitas proses kerja yang dapat dikontrol dan dievaluasi secara berulang. Selain itu, pemimpin juga digambarkan sebagai figur pelayanan, sebagaimana disebutkan

bahwa pemimpin ideal harus “seperti *customer service*... mampu melakukan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat” (Wawancara, 22 Oktober 2025). Hal ini menandakan bahwa kepemimpinan pariwisata di Kebonsari mengandung unsur *service-oriented leadership* yang menempatkan pemimpin sebagai fasilitator dan mencari solusi terhadap persoalan pelayanan wisata.

Selain unsur struktural dan pelayanan, temuan lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata juga dibangun melalui kebersamaan warga dan mekanisme partisipatif. Informan dari wawancara kedua menyatakan bahwa “kalau di Kampung Pring Kebonsari itu kita satu kebersamaan” (Wawancara, 4 Desember 2025). Prinsip ini tercermin melalui pelibatan berbagai kelompok masyarakat seperti ibu-ibu dalam paket *cooking class* dan para sesepuh dalam kelas anyaman. Menariknya, pembagian peran tersebut tidak bersifat hierarkis, karena tidak ada ketua bidang dalam setiap kegiatan. Peran diambil berdasarkan kesediaan dan kapasitas masing-masing kelompok, sehingga kepemimpinan bersifat kolektif dan pemimpin lebih berperan sebagai penghubung antarwarga dari pada sebagai pengendali tunggal aktivitas pariwisata.

Pada ranah pengambilan keputusan dan keberlanjutan kelembagaan, ditemukan bahwa sistem musyawarah berbasis suara terbanyak menjadi mekanisme utama dalam menyepakati keputusan pasca-kegiatan. Evaluasi dilakukan “dengan sistem berdiskusi bersama” dan hasilnya ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang disepakati bersama (Wawancara, 4 Desember 2025). Informan menegaskan bahwa pemimpin harus mampu “mencari pengganti sebagai narahubung ketika ketua berhalangan hadir” (Wawancara, 22 Oktober 2025). Rangkaian temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan pariwisata di Kebonsari berjalan melalui dua pola kerja yang saling melengkapi. Di satu sisi, kepemimpinan dijalankan dengan cara yang teratur, terencana, dan memiliki alur kerja yang jelas sehingga setiap kegiatan wisata dapat dikendalikan dan dievaluasi dengan baik. Di sisi lain, proses pengelolaan wisata juga bertumpu pada kebersamaan warga, pembagian peran secara sukarela, serta keputusan yang diambil melalui musyawarah. Kedua pola tersebut membuat pengembangan pariwisata tidak bertumpu pada satu figur tertentu, melainkan menjadi usaha bersama yang berkelanjutan.

Sektor Bisnis

Hasil *FGD* menunjukkan bahwa para pelaku dan penggerak bisnis di Desa Kebonsari memaknai kepemimpinan sebagai proses pengaturan bersama yang

menekankan keteraturan dan koordinasi. Ketua BUMDes, Pak Galih, menyampaikan bahwa “dalam organisasi itu harus terparameter, terencana, terpola kalau ingin maju. Polanya harus terstruktur, karena terstruktur itulah makanya kita harus satu komando,” yang artinya organisasi hanya dapat berkembang jika dijalankan secara terstruktur, terencana, dan memiliki satu arah komando. Ia juga menegaskan bahwa di Kebonsari diterapkan pola satu pintu dalam pengelolaan pariwisata, bisnis, dan budaya agar tidak terjadi tumpang tindih antar aktor. Dalam konteks desa, Pak Galih menyampaikan, “di desa itu perubahan bisa cepat terjadi, karena sumbunya pendek, ada pemerintah desa yang bagus karena belajar dari BUMDes, ada juga sebaliknya.” Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bisnis di Kebonsari harus adaptif, responsif, dan mampu membaca dinamika sosial-ekonomi yang berubah secara cepat.

Pada sisi lain, pelaku usaha bambu menggambarkan kondisi bisnis yang masih berjalan dengan pola lama. Pak Fuad, pada *FGD* tanggal 4 Desember 2025, menyampaikan bahwa usaha bambu masih bertahan pada model produksi tradisional tanpa pengembangan produk. Sementara, pemasaran sebagian besar masih mengandalkan pasar tradisional dan sangat sedikit yang memanfaatkan pemasaran daring. “Pemasaran masih mengandalkan pasar tradisional; online hanya 1 sampai 2 orang yang melakoni.” ungkap Pak Fuad. Ia juga menyampaikan keterbatasan dukungan dari pemerintah desa akibat batasan anggaran. Dalam diskusi yang sama, Pak Fuad menekankan bahwa kepemimpinan tidak selalu ditunjukkan lewat instruksi verbal, tetapi melalui tindakan nyata yang bisa diteladani sehingga orang lain bergerak dengan sendirinya.

Selain persoalan struktural dan pasar, para informan menekankan pentingnya relasi sosial dalam keberlangsungan bisnis. Pak Anang menyampaikan, “relasi dan jaringan itu penting, lebih banyak serawung, lebih banyak keterbukaan soal produk dan harga”, yang berarti keterbukaan soal produk dan harga serta intensitas pergaulan menjadi kunci membangun kepercayaan. Pak Fuad menambahkan bahwa ketika relasi dibangun seperti keluarga, persaingan dapat berlangsung secara sehat dan tidak saling menjatuhkan pula. Para pelaku usaha juga menyampaikan harapan agar ke depan inovasi produk dapat dikembangkan oleh generasi muda, perluasan jaringan pasar dilakukan bersama, dan sinergi antar pelaku diperkuat untuk menghindari konflik usaha yang pernah terjadi sebelumnya.

Rangkaian cerita informan menunjukkan bahwa kepemimpinan bisnis di Kebonsari dijalankan melalui proses yang berangkat dari kebutuhan dan pengalaman masyarakat. Inisiatif muncul dari pemimpin lokal yang berperan sebagai penggerak,

kemudian dibawa ke ruang musyawarah komunitas untuk menyepakati arah bersama. Peran utama pemimpin juga dikatakan bukan hanya untuk mengatur, tetapi melayani, menjadi contoh, dan menjaga kebersamaan. Cara kerja kepemimpinan berlangsung melalui tahapan inisiatif, musyawarah, partisipasi dan sosialisasi. Pola kepemimpinan inilah yang membentuk fondasi pengelolaan bisnis desa, meskipun masih menghadapi tantangan inovasi dan perluasan pasar.

Sektor Budaya

Pertemuan pertama dilakukan pada 22 Oktober 2025 dengan Pak Beni dan Pak Galih, dua tokoh kunci yang sejak awal dikenal masyarakat sebagai penggerak utama kegiatan budaya. Wawancara dilakukan di BALKONDES. Pada pertemuan itu, Pak Galih menjelaskan bahwa keberlanjutan kegiatan budaya di Kebonsari sangat bergantung pada cara pemimpin mengatur peran, bukan pada dominasi satu figur. Lalu disambung dengan Pak Beni yang menyampaikan bahwa seorang pemimpin “tidak harus menguasai semuanya, tetapi harus tahu dan memastikan ada pengganti ketika ketua berhalangan hadir; pemimpin harus punya kemampuan mencari narahubung yang dapat menggantikan peran tersebut”. Selama wawancara, ia menekankan pentingnya memiliki struktur kerja agar kegiatan tidak berhenti hanya karena satu orang tidak hadir.

Pertemuan berikutnya dilakukan pada 4 Desember 2025 dengan Pak Fuad, salah satu tokoh lokal yang dikenal warga karena konsistensinya menjaga area bambu dan menggerakkan anak muda dalam kegiatan budaya. Pak Fuad menceritakan bahwa pelestarian bambu bukan hanya aktivitas produksi kerajinan, tetapi sudah menjadi nilai moral yang diwariskan. Ia mengungkapkan bahwa generasi sekarang “tidak hanya memanfaatkan bambu, tapi dituntut mengambil peran seperti mengobservasi bambu. Ada tuntutan ya kalau bambu itu ditebang harus ditanam lagi”. Selama wawancara, beberapa pemuda tampak menghampiri beliau untuk menanyakan jadwal kerja bakti, menunjukkan bahwa tindakan-tindakan kecil seperti ini memang dipatuhi tanpa instruksi formal. Pada pertemuan yang sama, penulis mendapatkan penjelasan dari informan mengenai proses persiapan festival bambu yang biasanya dilakukan setiap tahun. Meskipun para penulis tidak menyaksikan langsung proses tersebut, informan menceritakan bahwa rangkaian festival umumnya didahului oleh serangkaian musyawarah yang cukup panjang. Salah satu informan menyampaikan bahwa dalam satu penyelenggaraan festival, “musyawarah itu tidak hanya satu atau dua kali, bisa sampai sepuluh kali pertemuan termasuk evaluasi. Setelah perwakilan

dusun sepakat, nanti dilanjutkan melibatkan pemerintah desa dan kelompok lain seperti PKK”.

Informan juga menjelaskan bahwa pada musim festival, warga dari berbagai kelompok mulai dari perwakilan dusun, pemuda, hingga ibu-ibu PKK biasanya terlibat dalam pembahasan acara, penyusunan kebutuhan dekorasi bambu, serta pembagian tugas panitia. Seluruh gambaran ini penulis peroleh dari keterangan lisan para informan, sebab pada proses pengumpulan data kegiatan festival belum berlangsung sehingga penulis belum dapat mengamati langsung proses pelibatan kelompok-kelompok tersebut.

Pembahasan Temuan

Pada bagian ini, pembahasan disusun berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Temuan-temuan tersebut tidak hanya dijelaskan secara deskriptif, tetapi juga dibahas secara analitis dengan mengaitkannya pada penelitian terdahulu dan kerangka konseptual kepemimpinan yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, pembahasan ini bertujuan untuk memperjelas bagaimana peran kepemimpinan lokal dijalankan dalam pengelolaan Desa Wisata Kampung Pring Kebonsari, serta bagaimana gaya kepemimpinan tersebut berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dan keberlanjutan pembangunan desa wisata.

Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan lokal di Desa Wisata Kampung Pring Kebonsari tidak bersifat tunggal atau seragam. Kepemimpinan dijalankan oleh beberapa aktor dengan peran dan gaya yang berbeda, yaitu kepemimpinan formal di tingkat kelurahan serta kepemimpinan fungsional yang dijalankan oleh BUMDes dan tokoh-tokoh penggerak desa. Pembagian peran ini justru memperkuat pengelolaan desa wisata karena masing-masing aktor bekerja sesuai dengan sektor dan kapasitasnya. Untuk memperjelas temuan tersebut, pembahasan berikut diuraikan ke dalam lima poin utama.

Kepemimpinan Lokal sebagai Penggerak Partisipasi Masyarakat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan lokal memiliki peran sentral dalam mendorong partisipasi masyarakat di Desa Wisata Kampung Pring Kebonsari. Partisipasi tidak muncul secara otomatis, melainkan dibangun melalui proses ajakan, keterlibatan langsung, dan pemberian ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemimpin desa, pengurus BUMDes, dan tokoh penggerak berperan sebagai pihak yang membuka ruang tersebut dan menjaga agar masyarakat merasa dilibatkan, bukan sekadar sebagai pelaksana kegiatan.

Peran ini sejalan dengan pandangan Pratiwi dan Nugroho (2021, hlm. 118) yang menyatakan bahwa desa wisata idealnya dikembangkan melalui keterlibatan aktif masyarakat sebagai aktor utama. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan tersebut sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemimpin memposisikan diri. Di Kebonsari, pemimpin tidak memaksakan kehendak, melainkan mendorong partisipasi melalui musyawarah, pembagian peran, dan keteladanan dalam bekerja.

Peran dan Gaya Kepemimpinan Lokal pada Sektor Pariwisata

Pada sektor pariwisata, arah pengelolaan lebih banyak dipimpin oleh BUMDes. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan BUMDes berperan sebagai pengarah, pengatur, sekaligus motivator masyarakat. BUMDes tidak hanya mengoordinasikan kegiatan wisata, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan terencana, memiliki pembagian tugas yang jelas, serta dievaluasi bersama setelah pelaksanaan.

Gaya kepemimpinan BUMDes pada sektor ini cenderung dimulai dari inisiatif pemimpin, kemudian dibawa ke ruang musyawarah, dilanjutkan dengan pelibatan masyarakat, dan diakhiri dengan sosialisasi keputusan. Pola ini menunjukkan gaya kepemimpinan yang bersifat inisiatif-terarah, tetapi tetap memberi ruang partisipasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Supit (2023, hlm. 31) yang menjelaskan bahwa kepemimpinan mencakup kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan, namun tetap membutuhkan pengikut yang bersedia terlibat.

Berbeda dengan temuan Susfenti (2016, hlm. 44) yang menekankan peran kuat pemimpin formal desa, di Kebonsari justru terlihat bahwa BUMDes mengambil peran strategis dalam sektor pariwisata. Kepemimpinan ini tidak bersifat otoriter, melainkan berfungsi sebagai pengelola sistem kerja agar partisipasi masyarakat dapat berjalan tertib dan berkelanjutan.

Peran dan Gaya Kepemimpinan Lokal pada Sektor Bisnis

Pada sektor bisnis, khususnya usaha kerajinan bambu dan UMKM desa, kepemimpinan BUMDes tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai motivator dan konselor masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Ketua BUMDes dan penggerak bisnis desa sering menjadi tempat masyarakat berkonsultasi terkait usaha, konflik antar pelaku, hingga persoalan pemasaran dan harga.

Gaya kepemimpinan pada sektor ini juga bersifat inisiatif dari pemimpin, kemudian dimusyawarahkan bersama, sebelum diimplementasikan secara kolektif.

Pola ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan bisnis di Kebonsari menekankan keterbukaan, kedekatan sosial, dan keteladanan. Temuan ini sejalan dengan Azmy (2021, hlm. 63) yang menekankan bahwa kepemimpinan efektif tidak hanya memberi arahan, tetapi juga memotivasi dan mendampingi anggota komunitas.

Namun, berbeda dengan harapan Yuliana (2023, hlm. 55) terkait inovasi produk dan pengembangan pasar, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bisnis di Kebonsari masih menghadapi tantangan dalam mendorong pembaruan produk dan pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa peran konselor dan penjaga keharmonisan sosial masih lebih dominan dibanding peran sebagai penggerak inovasi ekonomi.

Peran dan Gaya Kepemimpinan Lokal pada Sektor Budaya

Berbeda dengan sektor pariwisata dan bisnis, arah kepemimpinan pada sektor budaya lebih banyak berada di bawah kepemimpinan kelurahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kelurahan bersifat suportif dan partisipatoris. Pihak kelurahan biasanya memulai dengan memberikan ide atau topik kegiatan budaya, kemudian menyerahkannya kepada masyarakat untuk dirundingkan lebih lanjut, termasuk penyusunan rencana anggaran dan teknis pelaksanaan.

Setelah proses musyawarah selesai, hasilnya dikembalikan kepada lurah untuk disepakati bersama. Dalam proses ini, lurah tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan akhir, tetapi juga ikut terlibat dalam diskusi dan menyediakan dukungan, termasuk dukungan dana. Pola ini menunjukkan gaya kepemimpinan bawah ke atas, di mana masyarakat memiliki ruang besar untuk menentukan arah kegiatan budaya. Temuan ini sejalan dengan Herliana, Kolopaking, dan Hakim (2021, hlm. 99) yang menyatakan bahwa kepemimpinan demokratis mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih aktif. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa keterlibatan tersebut menjadi lebih kuat ketika pemimpin formal juga hadir dan terlibat langsung dalam proses musyawarah, bukan hanya sebagai pemberi persetujuan administratif.

Rangkuman Peran dan Gaya Kepemimpinan terhadap Keberlanjutan Desa Wisata

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan Desa Wisata Kampung Pring Kebonsari ditopang oleh kombinasi peran dan gaya kepemimpinan yang berbeda antar sektor. Kepemimpinan BUMDes pada sektor pariwisata dan bisnis cenderung bersifat inisiatif-terarah dengan tahapan inisiatif,

musyawarah, partisipasi, dan sosialisasi. Sementara itu, kepemimpinan kelurahan pada sektor budaya bersifat suportif dan partisipatoris dengan pola bawah ke atas.

Kombinasi ini memperkaya praktik kepemimpinan desa wisata dan membuat pengelolaan tidak bertumpu pada satu aktor saja. Temuan ini memperkuat pandangan Widiono dan Fathurrahman (2023, hlm. 87) tentang pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan kontekstual. Dengan adanya pembagian peran yang jelas dan gaya kepemimpinan yang saling melengkapi, Desa Wisata Kampung Pring Kebonsari memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang secara berkelanjutan, baik dari sisi pariwisata, bisnis, maupun pelestarian budaya.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, penelitian ini berangkat dari praktik kepemimpinan lokal yang diamati secara langsung di lapangan melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi di Desa Wisata Kampung Pring Kebonsari. Data lapangan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola peran dan gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh berbagai aktor, khususnya BUMDes dan pihak kelurahan, dalam sektor pariwisata, bisnis, dan budaya. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kepemimpinan lokal di Kebonsari tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat kolektif dan kontekstual, dengan perbedaan gaya kepemimpinan antar sektor yang memengaruhi bentuk partisipasi masyarakat. Temuan ini selanjutnya dibahas dengan mengaitkannya pada penelitian terdahulu dan kerangka konseptual kepemimpinan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai bagaimana kepemimpinan lokal bekerja secara nyata di tingkat desa wisata. Dengan demikian, Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian kepemimpinan lokal pada konteks desa wisata dengan menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak bersifat tunggal, melainkan dijalankan oleh berbagai aktor dengan peran dan gaya yang berbeda antar sektor. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung melihat kepemimpinan desa secara umum, penelitian ini menekankan pentingnya konteks sektor pariwisata, bisnis, dan budaya dalam membentuk praktik kepemimpinan lokal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai bagaimana kepemimpinan lokal bekerja secara nyata di lapangan dan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat serta keberlanjutan desa wisata.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan lokal memiliki peran kunci dalam

pengelolaan dan keberlanjutan Desa Wisata Kampung Pring Kebonsari. Kepemimpinan yang dijalankan tidak bersifat tunggal atau terpusat pada satu figur, melainkan terbentuk melalui pembagian peran antar aktor, khususnya antara BUMDes, pemerintah desa (kelurahan), dan tokoh-tokoh penggerak masyarakat. Pola kepemimpinan ini berkembang secara kontekstual sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing sektor, yaitu pariwisata, bisnis, dan budaya.

Pada sektor pariwisata, kepemimpinan Kepala BUMDes tampil dominan sebagai pengarah dan pengelola sistem kerja. Gaya kepemimpinan yang dijalankan bersifat inisiatif-terarah, di mana pemimpin memulai gagasan, mengkoordinasikan pembagian tugas, serta memastikan kegiatan berjalan terencana dan dapat dievaluasi. Namun, proses tersebut tetap dibangun melalui musyawarah dan pelibatan masyarakat, sehingga partisipasi warga tidak bersifat pasif, melainkan menjadi bagian dari mekanisme kerja kolektif. Pola ini memungkinkan kegiatan pariwisata berbasis bambu berjalan secara tertib, berulang, dan berkelanjutan.

Pada sektor bisnis, khususnya usaha kerajinan bambu dan UMKM desa, kepemimpinan BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai motivator, mediator, dan penjaga relasi sosial antar pelaku usaha. Kepemimpinan dijalankan melalui kedekatan sosial, keteladanan, serta keterbukaan dalam membangun jaringan dan kepercayaan. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kepemimpinan pada sektor bisnis masih menghadapi keterbatasan dalam mendorong inovasi produk dan perluasan pasar, sehingga peran kepemimpinan lebih kuat sebagai penjaga stabilitas sosial dibanding penggerak transformasi ekonomi.

Berbeda dengan dua sektor tersebut, kepemimpinan pada sektor budaya lebih banyak diarahkan oleh pemerintah desa dengan gaya yang suportif dan partisipatoris. Pihak kelurahan berperan membuka ruang musyawarah, memberikan dukungan administratif dan pendanaan, serta memastikan keberlangsungan kegiatan budaya tanpa mendominasi proses pengambilan keputusan. Pola kepemimpinan ini memungkinkan masyarakat terlibat secara luas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan budaya, sekaligus menjaga nilai-nilai lokal agar tetap hidup dalam pengembangan desa wisata.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan Desa Wisata Kampung Pring Kebonsari ditopang oleh kombinasi gaya kepemimpinan yang saling melengkapi antar sektor. Kepemimpinan BUMDes yang lebih terstruktur dan berorientasi kerja berpadu dengan kepemimpinan kelurahan yang partisipatoris dan suportif, sehingga pengelolaan desa wisata tidak bertumpu pada satu aktor saja.

Temuan ini menegaskan bahwa kepemimpinan lokal yang efektif dalam konteks desa wisata bukan hanya ditentukan oleh posisi formal, tetapi oleh kemampuan pemimpin membaca konteks sektor, membangun komunikasi, dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian kepemimpinan lokal dan desa wisata dengan menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak dapat dipahami secara umum dan seragam, melainkan perlu dilihat secara sektoral dan kontekstual. Dengan menempatkan kepemimpinan Kepala BUMDes dalam relasinya dengan sektor pariwisata, bisnis, dan budaya, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai bagaimana kepemimpinan lokal bekerja di lapangan dan mempengaruhi partisipasi masyarakat serta keberlanjutan pembangunan desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, R., & Darwis, R. S. (2023). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata kampung. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*.
- Azmy, A. (2021). *Teori dan dasar kepemimpinan*. Mitra Ilmu.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Haryanto. (2020). *Kepemimpinan komunitas dalam penguatan kelembagaan desa*. Pustaka Swadesi.
- Herliana, E., Kolopaking, L., & Hakim, L. (2021). Community-based tourism development: The role of leadership and social capital in rural tourism. *Journal of Socioeconomics and Development*.
- Herliana, R., Kolopaking, L. M., & Hakim, L. (2021). Pengaruh gaya kepemimpinan demokratis ketua Pokdarwis terhadap pemberdayaan masyarakat pada desa wisata. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*.
- Mukti, A. (2025). Dinamika pengembangan desa wisata di Indonesia: Analisis sistematis tentang pendorong, tantangan, dan dampak. *Jurnal Pembangunan Nagari*.
- Nasution, F., Gurning, F. P., & Eliska, E. (2020). *Kepemimpinan dan Berpikir Sistem* (R. R. A. Hasibuan, Ed.). UIN Sumatera Utara.
- Supit, B. F. (2023). *Buku ajar kepemimpinan: Teori dasar kepemimpinan dalam organisasi*. Eureka Media Aksara.

- Susfenti, N. E. M. (2016). Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat (community-based tourism–CBT) di Desa Sukajadi Kecamatan Carita. *Jurnal Pengembangan*.
- Widiono, A., & Fathurrahman, M. (2023). Analisis gaya kepemimpinan kepala desa pada pengembangan desa wisata berkelanjutan (sustainable rural tourism) di Indonesia. *Dinamika Governance Jurnal*.
- Yuliana, N. (2023). Peran ekonomi kreatif berbasis kerajinan lokal dalam pengembangan desa wisata. *Jurnal Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*.

